



# LKJ 2021 BKTM MAKASSAR

## KEMENTERIAN KESEHATAN RI Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat <sub>Made with PosterMy</sub>walkongehatan Tradisional Masyarakat (BKTM) Makassar



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat (BKTM) Makassar Tahun 2021.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan laporan akuntabilitas kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja yang merupakan perwujudan dari salah satu indikator dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), dan berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan prima serta menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Laporan Kinerja (LKj) ini secara garis besar berisikan informasi mengenai tugas dan fungsi organisasi, rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2021 yang mengacu pada Rencana Strategi Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024.

Dalam penulisan Laporan Kinerja (LKj) ini kami telah berusaha secara optimal, walaupun masih ditemukan banyak kendala dalam penyusunan dan penyempurnaan laporan ini, namun kami tetap berupaya melakukan semaksimal mungkin. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif masih sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat (BKTM) Makassar.

1akassar, 5 Januari 2022

Kepala

Dr. dr. Anna Khuzaimah, M.Kes

19710406200212001



#### RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat (BKTM) Makassar telah menyepakati penetapan kinerja indikator kinerja utama kegiatan pada tahun 2021 yaitu; 1) Nilai reformasi birokrasi pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan 2) Persentase kinerja RKAKL pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat. Selain itu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya BKTM Makassar menggunakan indikator kinerja antara yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesehatan tradisional. Dasar pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kesehatan Tradisional Masyarakat. Dengan demikian, tugas pokok dan fungsi organisasi tetap dapat terlaksana.

Target indikator nilai reformasi birokrasi pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat yang ditetapkan sebesar 57,5%, sementara target indikator persentase kinerja RKAKL pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat yaitu sebesar 82,5%. Indikator kinerja antara di bidang kesehatan tradisional yaitu sebesar 100%.

Berdasarkan perjanjian penetapan kinerja tersebut, Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat (BKTM) Makassar telah melakukan berbagai upaya untuk dapat mencapai target indikator kinerja dan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan serta Rencana Aksi Program Direktorat Kesehatan Masyarakat. Adapun hasil yang diperoleh pada tahun 2021 sebagai berikut; 1) realisasi nilai reformasi birokrasi pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat sebesar 83,24% dengan capaian 144,76%; 2) persentase kinerja RKAKL pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat sebesar 98,13% dengan capaian 118,95%; 3)



realisasi indikator kinerja antara di bidang kesehatan tradisional sebesar 104,64% dengan capaian 104,64%.

Upaya-upaya yang telah yang dilakukan antara lain dengan pelaksanaan program kesehatan masyarakat melalui kegiatan penguatan kelembagaan, pengembangan model pelayanan kesehatan tradisional di fasyankes, serta peningkatan jejaring kemitraan yankestrad dengan lintas sektor dan dunia usaha.

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut didukung dengan biaya yang cukup memadai. Pada tahun 2021, anggaran BKTM Makassar dapat terserap sebesar 98,30%.

Analisis terkait capaian indikator kinerja yang tertuang dalam LKj ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan masukan para pengambil kebijakan baik di lingkungan Direktorat Kesehatan Masyarakat, serta pihak-pihak lain yang memerlukannya.



## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	i\
LAMPIRAN	٠١
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	3
D. Tujuan, Strategi, Sasaran dan Indikator Organisasi	4
E. Sistematika	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. CAPAIAN KINERJA BKTM MAKASSAR	21
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA	24
1. Analisis Akuntabilias Capaian Indikator Kinerja	24
2. Analisis Sumber Daya dan Sarana	50
C. REALISASI ANGGARAN	55
BAB IV PENUTUP	58
A. KESIMPULAN	58
B. SARAN	50



## **LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Tahun 2021



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Perjanjian Kinerja BKTM Makassar Tahun 2021
Tabel 2	Target Indikator kinerja Antara BKTM Makassar Tahun 2021
Tabel 3	Capaian Indikator Knerja Utama BKTM Makassar Tahun 2021
Tabel 4	Capaian Indikator Kinerja Anatara BKTM Makassar Tahun 2021
Tabel 5	Perbandingan Capaian Kinerja Utama Tahun Berjalan dengan Target dan Tahun Periode Renstra
Tabel 6	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Antara Tahun Berjalan dengan Target dan Tahun Periode Renstra
Tabel 7	Distribusi Tenaga berdasarkan Jabatan/Kompetensi di BKTM Makassar Tahun 2021
Tabel 8	Nilai BMN dan Pos Perkiraan Neraca BKTM Makassar Tahun 2021
Tabel 9	Alokasi dan Realisasi Belanja BKTM Makassar Berdasarkan Komponen Kegiatan Tahun 2021



#### **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan dengan Target dan Target Periode Renstra Nilai Reformasi Birokrasi pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
Grafik 2	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan dengan Target dan Target Periode Renstra Presentasi Kinerja RKAKL pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
Grafik 3	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Antara Tahun 2020 dan 2021
Grafik 4	Status Kepegawaian di BKTM Makassar Tahun 2021
Grafik 5	Distribusi Tenaga Berdasarkan Jabatan/Kompetensi di BKTM Makassar Tahun 2021
Grafik 6	Visualisasi Nilai Aset Berdasarkan Jenis Aset Tahun 2020 dan 2021



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1	Kegiatan Penguatan Kelembagaan
Gambar 2	Sinkronisasi Perencanaan di Bidang Kesehatan Tradisiona
Gambar 3	Penendatanganan PKS dengan Badan Rehabilitasi BNN Baddoka
Gambar 4	Pengembangan model yankestrad
Gambar 5	Diseminasi Informasi Hasil Pengembangan Model Yankestrad di Kab. Jeneponto
Gambar 6	Kegiatan Germas dengan dengan Tradisional di Kab. Barru
Gambar 7	Fasilitasi TOGA di Puskesmas Wara Utara Kota Palopo
Gambar 8	Advokasi Yankestrad di Kab. Sidrap



#### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam rangka terwujudnya good governance sebagai salah satu prasyarat bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Maka salah satu upaya yang dilakukan adalah menciptakan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan sumber daya di instansi pemerintah dapat dilihat melalui laporan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi, yang dijalankan sesuai Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Program Direktorat Kesehatan Masyarakat, serta Rencana Aksi Kegiatan BKTM Makassar.

Tahun 2021 merupakan tahun kedua dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 visi Kementerian Kesehatan merupakan penjabaran dari visi presiden yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Kesehatan Tradisional Masyarakat, BKTM Makassar berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal, secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh sekertaris Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh direktur di lingkungan Direktorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sehubungan dengan adanya reorganisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan berdasarkan Permenkes nomor 25 tahun 2020 tentang Organisasi dan



Tata Kerja Kementerian Kesehatan maka saat ini BKTM Makassar berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.

Oleh Karena itu, BKTM Makassar telah melakukan upaya-upaya yang mendukung fungsi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat diantaranya yaitu penyusunan rencana program, pengelolaan data, informasi dan pelaksanaan pemantauan evaluasi program, serta pelaksanaan tugas teknis lainnya program kesehatan masyarakat. Disamping itu dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam Permenkes Nomor 31 Tahun 2020 maka BKTM Makassar menggunakan indikator kinerja antara di bidang kesehatan tradisional yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, maka disusunlah laporan kinerja secara periodik.

Selain sebagai bentuk akuntabilitas, laporan ini dapat dijadikan bahan dalam menentukan arah perjalanan pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

#### B. Tujuan Pelaporan Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja BKTM Makassar merupakan bentuk pertanggungjawaban dari kinerja BKTM Makassar pada tahun 2021 kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dan atau pertanggungjawaban dari Perjanjian Kinerja.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja BKTM Makassar yaitu:

 Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh BKTM Makassar sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2021.



 Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BKTM Makassar untuk meningkatkan kinerjanya

Adapun dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BKTM Makassar yaitu:

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- 3. Permenkes No. 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
- 4. Permenkes Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kesehatan Tradisional Masyarakat.

#### C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Kesehatan Tradisional Masyarakat, tugas pokok BKTM Makassar yaitu melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan tradisional. Selanjutnya fungsi BKTM Makassar yaitu sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- fasilitasi pengembangan dan penerapan model dan metode pelayanan kesehatan tradisional;
- c. fasilitasi rujukan penapisan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer;
- d. pemberian bimbingan teknis pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer;
- e. pelaksanaan kemitraan di bidang kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer;



- f. pengelolaan data dan sistem informasi
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Kesehatan Tradisional Masyarakat.

#### D. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Organisasi

Memperhatikan visi Presiden R.I. "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong" serta berdasarkan analisis lingkungan strategis, maka dirumuskan Visi Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat (BKTM) Makassar sebagai berikut:



Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan maka dirumuskan misi sebagai berikut:

- Kami adalah Unit Pelaksana Teknis di Bidang Kesehatan Tradisional Masyarakat
- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara holistic berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi melalui integrasi pelayanan kesehatan konvensional dan tradisional
- 3. Berkontribusi dalam upaya mewujudkan masyarakat sehat, mandiri, dan berkeadilan
- 4. Berjuang mewujudkan generasi unggul dan berdaulat



#### Tujuan

Adapun tujuan BKTM Makassar dalam mendukung Visi dan Misi yaitu akselerasi integrasi pelayanan kesehatan konvensional dan tradisional dalam rangka mewujudkan masyarakat sehat, mandiri, dan berkeadilan.

#### Sasaran

Dalam rangka mewujudkan tujuan yaitu akselerasi integrasi pelayanan kesehatan tradisional, maka BKTM Makassar berupaya agar pelayanan kesehatan tradisional dapat diintegrasikan dengan pelayanan kesehatan konvensional. Pada tahap awal BKTM Makassar berupaya mengintegrasikan pelayanan kesehatan tradisional dilaksanakan di fasyankes dasar yaitu puskesmas. Dengan demikian ditetapkan sasaran yaitu tersedianya puskesmas di wilayah kerja BKTM Makassar yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional.

#### Indikator Kinerja

Dalam rangka mencapai sasaran organisasi maka dilaksanakan beberapa kegiatan yang sekaligus ditetapkan sebagai indikator kinerja antara. Dengan demikian indikator kinerja antara merupakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai sasaran organisasi. Indikator kinerja antara tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan tugas dan fungsi BKTM Makassar dalam bentuk kegiatan. Adapun indikator kinerja antara yang disusun beserta target yang ditetapkan untuk tahun 2021:

Penguatan kelembagaan di bidang kesehatan tradisional
 Penguatan kelembagaan merupakan kegiatan pertemuan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkuat komitmen kab./kota dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional di wilayahnya.



- Pengembangan model pelayanan kesehatan tradisional di puskesmas kab./kota
  - Pengembangan model pelayanan kesehatan tradisional merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan memberikan contoh model pelayanan kesehatan tradisional yang dapat diintegrasikan di puskesmas kab./kota. Pada tahun 2021 ditargetkan dilaksanakan di 4 puskesmas yaitu di Puskesmas Ralla & Puskesmas Doi-Doi Kab. Barru, Puskesmas Moncobalang & Rumbia Kab. Jeneponto
- 3) Penapisan pelayanan kesehatan tradisional Penapisan pelayanan kesehatan tradisional merupaka kegiatan yang dilakukan dalam rangka menapis jenis pelayanan tradisional apa yang dapat dijadikan sebagai model pelayanan kesehatan tradisional di fasyankes. Pada tahun 2021 kegiatan ini ditargetkan untuk menghasilkan satu dokumen penapisan.
- 4) Pemberian bimbingan teknis pelayanan kesehatan tradisional Bimbingan teknis pelayanan kesehatan tradisional merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memfasilitasi puskesmas kabupaten kota dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional berbasis asuhan mandiri pemanfaatan tanaman obat keluarga (TOGA) dan pengolahan makanan fungsional. Kegiatan ini dimulai dengan memfasilitasi penanaman TOGA di puskesmas kab./kota, kemudian memberikan bimbingan teknis kepada pengelola program kesehatan tradisional maupun tenaga terlatih kesehatan tradisional dalam memanfaatakan TOGA untuk pembuatan ramuan dan pembuatan makanan fungsional secara mandiri. Dengan demikian pengelola program kestrad dan nakes terlatih yankestrad dapat melanjutkan edukasi pemanfaatan TOGA kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memanfaatkan TOGA untuk memelihara kesehatan maupun mengatasi masalah kesehatannya secara mandiri. Pada tahun 2021 ini kegiatan ditargetkan dilaksanakan di 18 puskesmas kab./kota



- Kemitraan di bidang kesehatan tradisional Kemitraan di bidang kesehatan tradisional dilaksanakan untuk menjalin kerja sama di bidang kesehatan tradisional dengan LP/LS termasuk perguruan tinggi, organisasi profesi, hingga dunia usaha. Pada tahun 2021 ditargetkan terlaksananya kemitraan dengan LP/LS yang menghasilkan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- 6) Pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan tradisional Pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan tradisional merupakan kegiatan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayana kesehatan tradisional di puskesmas kab./kota terutama yang menjadi sasaran kegiatan pengembangan model, bimbingan teknis, dan kemitraan. Pada tahun 2021 ditargetkan dilaksanakan di 15 kab./kota sesuai dengan jumlah kab./kota sasaran kegiatan pengembangan model, bimbingan teknis, dan kemitraan.

Sehubungan dengan adanya reorganisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan berdasarkan Permenkes nomor 25 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan maka saat ini BKTM Makassar berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat yang secara teknis administratif dibina oleh Sekertariat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Oleh karena itu, selain indikator kinerja antara BKTM Makassar juga menggunakan indikator kinerja Sekertariat Jenderal Kesehatan Masyarakat yaitu 1) Nilai reformasi birokrasi pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat sebesar 57,5% dan 2) Persentase kinerja RKAKL pada Program Kesehatan Masyarakat sebesar 82,5%.

#### E. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa pelayanan kesehatan tradisional merupakan salah satu dari bentuk upaya kesehatan (pasal 48). Kemudian disebutkan pada pasal 59 ayat 2 bahwa untuk menjamin keamanan dan kemanfaatan



pelayanan kesehatan tradisional maka dalam penyelenggaraanya perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan. Berdasarkan Permenkes Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kesehatan Tradisional, BKTM Makassar sebagai salah satu UPT Kementerian Kesehatan memiliki tugas yaitu melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan tradisional.

Selain itu dalam upaya pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan pendukung diantaranya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, Permenkes Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, Permenkes Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi, dan Permenkes Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.

Lebih lanjut lagi dengan diterbitkanya Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi maka pelayanan kesehatan tradisional sudah menjadi bagian dari struktur organisasi baik di dinas kesehatan provinsi maupun di kab./kota. Beberapa daerah juga telah mengalokasikan APBD khusus untuk penyelenggaraan program kesehatan tradisional.

Adanya peningkatan minat masyarakat dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan tradisional sebagai salah satu upaya kemandirian masyarakat dalam memelihara kesehatannya tercermin dari hasil Riskesdas Tahun 2018. Hasil riset tersebut menunjukkan persentase rumah tangga yang memanfaatkan yankestrad sebesar 31,4%, sedangkan proporsi rumah tangga yang memanfaatkan Taman Obat Keluarga (Toga) sebesar 24,6%. Proporsi jenis upaya pelayanan kesehatan tradisional yang terbanyak digunakan adalah keterampilan manual (65,3%), ramuan jadi



(48%), ramuan buatan sendiri (31,8%), keterampilan olah pikir (1,9%) dan keterampilan energi (2,1%).

Selain aspek strategis terdapat pula beberapa permasalahan utama yang dihadapi BKTM Makassar beberapa diantaranya yaitu kurangnya dukungan regulasi dari pemerintah daerah terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional, distribusi nakes terlatih kestrad yang belum merata dan memadahi, keterbatasan sarana dan prasaranan penunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan tradisional, kurangnya pelatihan SDM di bidang pelayanan kesehatan tradisional, kurangnya NSPK pelayanan kesehatan tradisional, dan belum terintegrasinya sistem informasi kesehatan tradisional antara pemerintah daerah, direktorat yankestrad dan BKTM Makassar. Selain itu terdapat permasalahan khusus di tahun 2021 yaitu terjadinya wabah pandemi Covid-19 yang menyebabkan terbatasnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan pemantauan evaluasi pelayanan kesehatan tradisional secara langsung. Beberapa kab./kota yang telah mengalokasikan APBD khusus untuk penyelenggaraan program kesehatan tradisional mengalami refocusing sehingga anggaran dialihkan untuk penanggulangan pandemi Covid-19.

#### F. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat (BKTM) Makassar adalah sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I ini disajikan latar belakang penulisan LKj, maksud dan tujuan penulisan LKj, penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.



#### BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat (BKTM) Makassar tahun 2021.

#### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan
- 6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
- 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Pejanjian Kinerja



#### BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilkasanakan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

#### LAMPIRAN

- 1) Penetapan Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



#### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no 25 tahun 2004. Selain itu berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, telah ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024.

Sasaran capaian kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja, secara operasional mengacu kepada dokumen Rencana Aksi (Renstra) Eselon I dalam hal ini Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Berdasarkan Permenkes Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, saat ini BKTM Makassar berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Oleh karena itu, sasaran dan indikator kegiatan BKTM Makassar mengikuti Sekertaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sesuai dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara BKTM Makassar dengan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat

Perjanjian kinerja Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat (BKTM) Makassar telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Perjanjian Kinerja Balai Kesehatan Masyarakat (BKTM) Makassar Tahun 2021 ditampilkan pada tabel 1 berikut ini:



Tabel 1 Perjanjian Kinerja BKTM Makassar Tahun 2021

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Kesehatan Masyarakat	<ol> <li>Nilai reformasi birokrasi pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat</li> <li>Persentase kinerja RKAKL pada Program Kesehatan Masyarakat</li> </ol>	57,5% 82,5%

Sumber: Data Primer Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan antara atasan dan bawahan menjadi kesepakatan yang mengikat untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai upaya mewujudkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkualitas. Dokumen perjanjian kinerja BKTM Makassar tahun 2021 yang telah ditandatangani bersama oleh Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat dan Kepala BKTM Makassar pada bulan Desember 2020.

Indikator nilai reformasi birokrasi pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat merupakan hasil penilaian mandiri/ self assessment terkait pelaksanaan 8 area perubahan pada reformasi birokrasi di lingkup BKTM Makassar. Penilaian ini dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal Kementerian Kesehatan terhadap pemenuhan indikator WBK di lingkup BKTM Makassar. Dalam rangka mendukung capaian nilai reformasi birokrasi pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat, pimpinan berkomitmen untuk berperan aktif dalam menjaga dan mempertahankan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:

 Melakukan penataan tatalaksana organisasi melalui penyempurnaan struktur dan susunan organisasi yang mengacu pada Permenkes No.31



- Tahun 2020. Output dari kegiatan ini yaitu tersedianya satu dokumen rekomendasi reorganisasi BKTM Makassar berdasarkan Permenkes Nomor 31 Tahun 2020 yang dijadikan acuan dalam perombakan struktur organisasi dan pelaksanaan tata hubungan kerja organisasi.
- 2) Melakukan penataan sistem manajemen SDM melalui pembaharuan fitur pemantauan dan evaluasi kinerja pegawai pada Sistem Informasi BKTM Makassar. Output dari kegatan ini yaitu tersedianya pembaharuan fitur terkait sistem manajemen SDM di aplikasi sim BKTM.
- 3) Meningkatkan penguatan akuntabilitas melalui penyusunan dan pengevaluasian rencana aksi kegiatan (RAK) tahun 2020-2024, rencana kinerja tahunan 2021, memonitor capaian bulanan dan menginputnya ke dalam aplikasi e performance, mengevaluasi capaian triwulanan melalui pertemuan rutin, peningkatan kapasitas SDM penyusun SAKIP, dan penyusunan SAKIP tepat pada waktunya. Output dari kegiatan ini yaitu dokumen RAK 2020-2024 revisi, RKT tahun 2021, dan LKj tahun 2021
- 4) Penguatan pengawasan dengan mengoptimalkan kerja Tim PIPK, pendampingan SPIP oleh Tim Itjen. Output dari kegiatan ini yaitu dokumen laporan tim PIPK tahun 2021 dan dokumen SPIP tahun 2021
- 5) Mempertahankan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui pemasangan banner capaign sebagai peringatan bagi semua pegawai untuk selalu menghindari terjadinya KKN, pemantauan terhadap sistem pengaduan masyarakat, dan pemantauan terkait gratifikasi. Output dari kegiatan ini yaitu tersedianya dokumen hasil pemantauan pengaduan masyarakat dan dokumen hasil pemantauan gratifikasi.
- 6) Terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tetap melakukan reviu dan perbaikan standar pelayanan dan SOP, peningkatan SDM seluruh pegawai secara berkala, terus melakukan update informasi pelayanan dan kegiatan balai melalui media sosial resmi BKTM Makassar dan terus melakukan survei kepuasan dan perbaikan pada instrumen survei kepuasan, serta terus mengupdate ke media informasi balai. Output dari kegiatan ini yaitu tersedianya dokumen monev SOP-AP,



terupdatenya informasi di media sosial BKTM Makassar, dan tersedianya dokumen hasil survei kepuasan pelanggan.

Persentase kinerja RKA-K/L Program pembinaan Kesehatan Masyarakat yang efektif dan efisien adalah hasil penilaian kinerja RKA KL dengan menggunakan tools aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan. Untuk mencapai indikator kinerja persentase kinerja RKAKL pada Program Kesehatan Masyarakat dilaksanakan 4 kegiatan pendukung yaitu 1) Layanan Kesehatan Tradisional Masyarakat; 2) Layanan Perkantoran; 3) Layanan Umum dan Pengadaan, 4) Layanan SDM.

#### 1. Layanan Kesehatan Tradisional Masyarakat

Layanan kesehatan masyarakat ditetapkan menghasilkan target 17 kegiatan yaitu;

- a. Pelayanan kesehatan tradisional
- b. Pojok jamu dan pangan fungsional
- Pengembangan kelembagaan pelayanan kesehatan traddisional di fasyankes
- d. Layanan operasional PNBP
- e. Pertemuan jejaring kemitraan
- f. Identifikasi sasaran kemitraan
- g. Pertemuan sinkronisai perencanaan teknis UPT dan daerah
- h. Pengembangan layanan online BKTM Makassar
- i. Pengembangan model dalam bentuk bedah kasus secara daring
- j. Pertemuan sasaran pengembangan model kab./kota
- k. Pengembangan model pelayanan kesehatan tradisional di fasyankes kab./kota
- I. Diseminasi dan informasi pengembangan model kesehatan tradisional
- m. Pertemuan penguatan kelembagaan
- n. Advokasi yankestrad
- Fasilitasi pemanfaatan TOGA dalam pengendalian 10 penyakit utama di wilayah puskesmas



- p. Kegiatan sosialisasi yankestrad dalam menunjang program GERMAS
- q. Orientasi teknis kesehatan tradisional

#### 2. Layanan Perkantoran

Layanan perkantoran ditetapkan menghasilkan dua kegiatan yaitu pembayaran gaji dan tunjangan dan operasional dan pemeliharaan kantor. Kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan ditargetkan untuk dilaksanakan selama 12 bulan dengan output satu kegiatan, begitu pula dengaan kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor ditargetkan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok & fungsi organisasi selama 12 bulan dengan target yang ditetapkan yaitu satu kegiatan.

#### 3. Layanan Umum dan Pengadaan

Kegiatan pelayanan umum dan pengadaan dilaksanakan untuk menunjang sarana dan prasaranan pelayanan kesehatan tradisional di BKTM Makassar, kegiatan ini ditetapkan dengan target output satu kegiatan.

#### 4. Layanan SDM

Layanan SDM ditetapkan menghasilkan 9 kegiatan yaitu:

- a) Peningkatan kapasitas manajemen
- b) Pengembangan penunjang layanan kestrad
- c) Workshop pengembangan penunjang pelayanan kesehatan tradisional di bidang hipnosis
- d) Peningkatan kapasitas pengelolaan ramuan
- e) Peningkatan kapasitas pengelolaan gizi
- f) Peningkatan kapasitas fisioterapis
- g) Pengembangan penguatan services excelence
- h) Design peningkatan pengelolaan kebun
- i) Workshop penyusunan rekomendasi kebijakan dan penyusunan LAKIP

Selain indikator kinerja utama yang mengikuti indikator kinerja utama eselon 1, BKTM Makassar juga menetapkan Indikator Kinerja



Antara di bidang kesehatan tradisional yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dasar penetapan Indikator Kinerja Antara ini yaitu Permenkes nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Kesehatan Tradisional Masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan permenkes tersebut, BKTM Makassar telah menyusun tujuan organisasi. Adapaun tujuan BKTM Makassar yaitu tersedianya puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilaksanakan beberapa kegiatan yang merupakan perwujudan dari fungsi BKTM Makassar sekaligus ditetapkan sebagai indikator kinerja antara. Adapun indikator kinerja antara yang disusun beserta target yang ditetapkan untuk tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2
Target Indikator Kinerja Antara BKTM Makassar
Tahun 2021

Talluli 202 I				
		TARGET		
NO	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	PERSENTASE	
1	Penyusunan rencana, program, dan anggaran	2 kegiatan	100%	
2	Fasilitasi pengembangan dan penerapan model yankestrad	17 kegiatan	100%	
3	Fasilitasi rujukan penapisan yankestrad	1 kegiatan	100%	
4	Bimbingan teknis yankestrad	18 kegiatan	100%	
5	Pelaksanaan kemitraan di bidang kesehatan tradisional	6 kegiatan	100%	
6	Monitoring evaluasi yankestrad	15 kegiatan	100%	

Sumber: Data Primer Dokumen Rencana Kerja Tahunan BKTM Makassar 2021

 Penyusunan rencana program dan anggaran
 Dalam rangka menjalankan fungsi penyusunan rencana program dan anggaran maka dilaksanakan dua kegiatan yaitu penguatan



kelembagaan dan sinkronisasi perencanaan bidang kesehatan tradisional. Penguatan kelembagaan merupakan kegiatan pertemuan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkuat komitmen kab./kota dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional di wilayahnya sehingga dapat tersedia pelayanan kesehatan tradisional di fasyankes sesuai dengan amanat Permenkes nomor 37 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan tradisional Integrasi. Sementara kegiatan sinkronisasi dilaksanakan untuk menyelaraskan perencanaan kegiatan dan anggaran antara BKTM Makasar dengan dinas kesehatan kab./kota di wilayah jejaring BKTM Makassar sehingga pelaksanaan kegiatan terkait yankestrad dapat lebih efektif dan efisien.

2) Fasilitasi pengembangan dan penerapan model yankestrad Dalam rangka menjalankan fungsi fasilitasi pengembangan dan penerapan model yankestrad maka dilaksanakan beberapa kegiatan mulai dari kegiatan pelayanan kesehatan tradisional yang dilaksanakan di dalam gedung BKTM Makassar yang terdiri atas: poli umum, akupunktur, akupresur, ramuan, gizi, SPA. Kegiatan pelayanan ini dilaksanakan dalam rangka pengembangan model dan metode pelayanan kesehatan tradisional yang dapat diaplikasikan di fasyankes kab./kota. Hasil dari kegiatan tersebut yaitu model dan metode pelayanan kesehatan tradisisonal yang dapat diintegrasikan ke fasyankes kab./kota.

Sebagai upaya untuk mengintegrasikan model dan metode yang dihasilkan dari kegiatan sebelumnya maka dilaksanakan kegiatan pengembangan model yankestrad di fasyankes kab./kota yang terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan. Dimulai dengan kegiatan penentuan sasaran pengembangan model yankestrad, dilanjutkan dengan kegiatan pengembangan model di fasyankes kab./kota itu sendiri, kemudian 6 bulan kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan



monitoring evaluasi hasil pengembangan model yankestrad di fasyankes kab./kota sasaran kegiatan pengembangan model. Hasil monitoring evaluasi tadi akan diseminasi informasikan kepada dinas kesehatan kab./kota sasaran kegiatan pengembangan model.

Guna memperoleh dukungan regulasi dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional di fasyankes kab./kota maka dilaksanakan kegiatan advokasi yankestrad. Selain itu untuk menyebarluaskan hasil pengembangan model yankestrad kepada masyarakat maka dilaksanakan kegiatan GERMAS dan diseminasi informasi yankestrad.

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan fungsi fasilitasi pengembangan dan penerapan model yankestrad menargetkan output 25 kegiatan.

#### 3) Fasilitasi rujukan penapisan yankestrad

Fungsi fasilitasi rujukan penapisan dilaksanakan dengan tujuan untuk menapis model, bahan, maupun metode pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan model pelayanan kesehatan tradisional. Untuk tahun 2021 ditetapkan satu target kegiatan penapisan yankestrad.

## 4) Bimbingan teknis yankestrad

Fungsi bimbingan teknis yankestrad diwujudkan melalui dua kegiatan yaitu fasilitasi pengembangan TOGA berdasarkan 10 penyakit terbanyak di wilayah puskesmas dan kegiatan bimbingan teknis asuhan mandiri. Pada tahun 2021, kegiatan fasilitasi pengembangan TOGA ditargetkan dilaksanakan di 18 puskesmas.

5) Pelaksanaan kemitraan di bidang kesehatan tradisional Pelaksanaan fungsi kemitraan di bidang kesehatan tradisional dimulai dengan dilaksanakannya kegiatan identifikasi sasaran kemitraan yang dilanjutkan dengan kegiatan pertemuan sasaran kemitraan yang nantinya akan menghasilkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di bidang pengembangan pelayanan kesehatan tradisional



dengan LP/LS. Kegiatan indentifikasi sasaran kemitraan dan pertemuan sasaran kemitraan ditargetkan sebanyak 3 kegiatan masing-masing.

#### 6) Monitoring evaluasi pemanfaatan TOGA

Pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan tradisional merupakan kegiatan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional di puskesmas kab./kota terutama yang menjadi sasaran kegiatan pengembangan model, bimbingan teknis. Pada tahun 2021 ditargetkan dilaksanakan di 15 kab./kota sesuai dengan jumlah kab./kota sasaran kegiatan pengembangan model, dan bimbingan teknis.



#### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA BKTM MAKASSAR

Pengukuran kinerja dalam penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada awal tahun anggaran dengan realisasi kinerja yang dicapai pada akhir tahun anggaran.

Untuk menetapkan target indikator kinerja dibutuhkan beberapa faktor pendukung dan data dasar yang mendukung penetapan target indikator. Adapun dasar penetapan target telah diuraikan dalam dokumen Analisis Penetapan Target Kinerja Tahun 2020-2024. Sedangkan sumber data realisasi target diperoleh dari data laporan bulanan rutin, evaluasi capaian kinerja per triwulan, dan laporan tahunan BKTM Makassar.

Kepala balai membentuk tim yang bertugas melakukan analisa indikator kinerja, dalam hal ini target atau perencanaan program dan keuangan dan realisasi anggaran pada akhir tahun anggaran. Selain itu juga memperhatikan berbagai variabel lainnya yang mendukung analisa Laporan Kinerja seperti halnya dukungan sumber daya keuangan, sumber daya manusia, analisis tugas dan fungsi organisasi.

Pengukuran pencapaian kinerja merupakan pengukuran target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Pencapaian inilah yang akan digunakan sebagai ukuran tingkat keberhasilan dalam mengukur kinerja kegiatan.

#### Capaian Indikator Kinerja BKTM Makassar

BKTM Makassar memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berasal dari eselon 1 yaitu 1) Nilai reformasi birokrasi pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat dengan target sebesar 57,5%, 2) Presentasi kinerja RKAKL pada program Pembinaan Kesehatan



Masyarakat dengan target sebesar 82,5%. Target, realisasi, dan capaian IKU BKTM Makassar dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 3
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKTM Makassar
Tahun 2021

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALI SASI	CAPAI AN
1	Meningkatny a dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Kesehatan Masyarakat	<ol> <li>Nilai reformasi birokrasi pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat</li> <li>Persentase kinerja RKAKL pada Program Kesehatan Masyarakat</li> </ol>	57,5% 82,5%	83,24% 98,13%	144,76% 118,95%

Sumber: Data Primer BKTM Makassar Tahun 2021

Pada tabel 3 terlihat bahwa IKU BKTM Makassar telah terealisasi melampaui target yang ditetapkan. Nilai reformasi birokrasi pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat merupakan hasil penilaian mandiri/ self assessment terkait pelaksanaan 8 area perubahan pada reformasi birokrasi di lingkup BKTM Makassar. Penilaian ini dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Kementerian Kesehatan terhadap pemenuhan indikator WBK di lingkup BKTM Makassar. Penilaian telah dilaksanakan pada tanggal 23-24 Maret 2021 dengan hasil nilai total 83,24%. Dengan demikian realisasi indikator nilai reformasi birokrasi pada program pembinaan kesehatan masyarakat telah melampaui target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 144,76%.

Indikator kinerja persentase kinerja RKAKL pada Program Kesehatan Masyarakat merupakan hasil penilaian RKAKL



menggunakan tools aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan. Realisasi indikator kinerja ini telah melampaui target sebesar 98,13% dengan capaian indikator kinerja sebesar 118,95%.

Selain indikator kinerja utama yang mengikuti indikator kinerja utama eselon 1, BKTM Makassar juga menetapkan Indikator Kinerja Antara di bidang kesehatan tradisional yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dasar penetapan Indikator Kinerja Antara ini yaitu Permenkes nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Kesehatan Tradisional Masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan permenkes tersebut, BKTM Makassar telah menyusun tujuan organisasi. Adapaun tujuan BKTM Makassar yaitu tersedianya puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilaksanakan beberapa kegiatan yang merupakan perwujudan dari fungsi BKTM Makassar sekaligus ditetapkan sebagai indikator kinerja antara. Target, realisasi, dan capaian Indikator Kinerja Antara BKTM Makassar dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini:

Tabel 4
Capaian Indikator Kinerja Antara BKTM Makassar
Tahun 2021

	1 411 411			
No	INDIKATOR KINERJA ANTARA	TARGET	REALI SASI	CAPAIAN
1	Penyusunan rencana, program, dan anggaran	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
2	Fasilitasi pengembangan dan penerapan model yankestrad	17 kegiatan	17 kegiatan	100%



3	Fasilitasi rujukan penapisan yankestrad	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
4	Bimbingan teknis yankestrad	18 kegiatan	23 kegiatan	127,8%
5	Pelaksanaan kemitraan di bidang kesehatan tradisional	6 kegiatan	6 kegiatan	100%
6	Monitoring evaluasi yankestrad	15 kegiatan	15 kegiatan	100%

Sumber: Data Primer Laporan Tahunan BKTM Makassar Tahun 2021

Pada tabel 5 terlihat bahwa dari enam indikator kinerja antara yang telah ditetapkan terdapat satu indikator yang capaiannya melampaui target yaitu bimbingan teknis yankestrad.

#### **B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA**

#### 1. Analisis Akuntabilias Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Nilai reformasi birokrasi pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat merupakan hasil penilaian mandiri/ self assessment terkait pelaksanaan 8 area perubahan pada reformasi birokrasi di lingkup BKTM Makassar. Berdasarkan hasil penilaian mandiri/ self assessment yang telah dilaksanakan oleh TPI Kementerian Kesehatan, BKTM Makassar mendapatkan nilai 83,24% dengan uraian sebagai berikut:

## a) Komponen pengungkit

Berdasarkan hasil self assessment oleh TPI Kementerian Kesehatan terhadap pemenuhan indikator komponen pengungkit didapatkan nilai sebesar 45,73 (76,21%) dari total bobot maksimal 60 dengan rincian sebagai berikut:

#### 1) Manajemen Perubahan



Nilai capaian indikator manajemen perubahan yaitu 6,58 (82,29%) dari total bobot maksimal 8.

- Penataan Tatalaksana
   Nilai capaian indikator penataan tatalaksana yaitu 5,25
   (75,52%) dari totalbobot maksimal 7
- Penataan Sistem Manajemen SDM
   Nilai capaian indikator penataan sistem manajemen SDM
   yaitu 7,79 (77,89%) dari total bobot maksimal 10
- Penguatan Akuntabilitas Kinerja
   Nilai capaian indikator penguatan akuntabilitas yaitu 7,78
   (77,81%) dari total bobot maksimal 10.
- Penguatan Pengawasan
   Nilai capaian indikator penguatan pengawasan yaitu 10,81 (72,07%) dari total bobot maksimal 15
- Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
   Nilai capaian indikator penguatan kualitas pelayanan publik yaitu 7,51 (75,11%) dari total bobot maksimal 10.
- b) Komponen hasil

Berdasarkan hail self assessment diperoleh nilai sebesar 37,51 (93,78%) dari total maksimal 40. Nilai tersebut terdiri dari:

- 1) Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diperoleh dengan nilai 19,17 (95,86%) dari total bobot maksimal 20 diukur dengan menggunakan ukuran:
  - a) Nilai survei persepsi anti korupsi (survei eksternal) sebesar 14,17 (94,48%) dari total bobot maksimal 15.
  - b) Persentase penyelesaian TLHP sebesar 5 (100%).
- 2) Sasaran terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat yang diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal) diperoleh nilai sebesar 18,34 (91,70%) dari total bobot maksimal 20.



Dalam rangka mendukung capaian nilai reformasi birokrasi pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- 1) Melakukan penataan tatalaksana organisasi melalui penyempurnaan struktur dan susunan organisasi yang mengacu pada Permeknes No.31 Tahun 2020. Output dari kegiatan ini yaitu telah tersedianya satu dokumen rekomendasi reorganisasi BKTM Makassar berdasarkan Permenkes Nomor 31 Tahun 2020 yang dijadikan acuan dalam perombakan struktur organisasi dan pelaksanaan tata hubungan kerja organisasi.
- 2) Melakukan penataan sistem manajemen SDM melalui pembaharuan fitur pemantauan dan evaluasi kinerja pegawai pada Sistem Informasi BKTM Makassar. Output dari kegatan ini yaitu telah dilakukanya pembaharuan fitur terkait sistem manajemen SDM di aplikasi sim BKTM. Pada tahun 2021 telah tersedia fitur evaluasi perilaku kinerja 360 derajat dan pembaharuan akses aplikasi sim BKTM yang sebelumnya hanya dapat diakses di area kantor BKTM Makassar saat ini sudah dapat diakses dari luar area kantor.
- 3) Meningkatkan penguatan akuntabilitas melalui penyusunan dan pengevaluasian rencana aksi kegiatan (RAK) tahun 2020-2024, rencana kinerja tahunan 2021, memonitor capaian bulanan dan menginputnya ke dalam aplikasi e performance, mengevaluasi capaian triwulanan melalui pertemuan rutin, peningkatan kapasitas SDM penyusun SAKIP, dan penyusunan SAKIP tepat pada waktunya. Output dari kegiatan ini yaitu telah tersedianya dokumen RAK 2020-2024 revisi, RKT tahun 2021, dan LKj tahun 2021.
- 4) Penguatan pengawasan dengan mengoptimalkan kerja Tim PIPK, pendampingan SPIP oleh Tim Itjen. Output dari kegiatan



- ini yaitu telah tersedianya dokumen laporan tim PIPK tahun 2021 dan dokumen SPIP tahun 2021
- 5) Mempertahankan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui pemasangan banner capaign sebagai peringatan bagi semua pegawai untuk selalu menghindari terjadinya KKN, pemantauan terhadap sistem pengaduan masyarakat, dan pemantauan terkait gratifikasi. Output dari kegiatan ini yaitu telah tersedianya dokumen hasil pemantauan pengaduan masyarakat dan dokumen hasil pemantauan gratifikasi.
- 6) Terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tetap melakukan reviu dan perbaikan standart pelayanan dan SOP, peningkatan kapasitas SDM seluruh pegawai secara berkala, terus melakukan update informasi pelayanan dan kegiatan balai melalui media sosial resmi BKTM Makassar dan terus melakukan survei kepuasan dan perbaikan pada instrumen survei kepuasan, serta terus mengupdate ke media informasi balai. Selain itu pada tahun 2021 dilakukan inovasi di bidang pelayanan dengan menyediakan sistem pendaftaran online untuk mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan tradisional di masa pandemi. Output dari kegiatan ini yaitu telah tersedianya dokumen monev SOP-AP, terudatenya informasi di media sosial BKTM Makassar, dan tersedianya dokumen hasil survei kepuasan pelanggan, serta tersedianya fitur pendaftaran online di website BKTM Makassar.

Adapun faktor-faktor pendukung terlaksananya kegiatankegiatan tersebut yaitu:

 a) adanya komitmen dari kepala balai dan seluruh ASN BKTM Makassar untuk memenuhi sebagian besar kriteria pada komponen pengungkit penilaian RB serta mewujudkan tata kelola unit kerja yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima



b) tersedianya sarana/fasilitas dalam pelaksanaan kegiatankegiatan dan penyusunan dokumen-dokumen terkait penilaian RB

Indikator kinerja persentase kinerja RKAKL pada Program Kesehatan Masyarakat merupakan hasil penilaian RKAKL menggunakan tools aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan. Realisasi indikator kinerja ini telah melampaui target sebesar 98,13% dengan capaian indikator kinerja sebesar 118,95%.

Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Persentase Kinerja RKAKL pada program pembinaan kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut:

- Terealisasinya kegiatan layanan kesehatan tradisional yang terdiri atas 17 sub komponen
- Terealisasinya layanan perkantoran yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan serta operasional pemeliharaan kantor selama 12 bulan
- Terealisasinya layanan umum dan pengadaan sebanyak satu kegiatan
- 4) Terealisasinya kegiatan layanan SDM sebanyak sembilan kegiatan

Adapun faktor-faktor yang mendukung tercapainya target tersebut yaitu:

- a) Dukungan penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan baik dari eselon 1 maupun yang dilaksanakan antara BKTM Makassar dengan kab./kota melalui kegiatan penguatan kelembagaan dan kegiatan sinkronisasi perencanaan bidang kesehatan tradisional
- b) Dukungan penyelenggaraan pengelolaan keuangan baik dari eselon 1 maupun Kemenkeu melalui kegiatan-kegiatan seperti konsolidasi laporan keuangan semester dan tahunan, telaah erekon, penilaian PIPK



- c) Dukungan penyelenggraan evaluasi pelaporan melalui e-monev
   Bappenas, e-monev DJA, dan e-renggar
- d) Adanya komitmen kepala balai dan seluruh ASN BKTM Makassar untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah direncanakan
- e) Tersedianya sarana/fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan kegiatan tersebut

Selain faktor-faktor pendukung ditemui pula beberapa faktor penghambat dalap proses pencapaian target yaitu:

- a) Pandemi Covid-19 yang melanda di awal tahun 2020 sampai saat ini masih mempengaruhi proses pencapaian target indikator, beberapa kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan di beberapa kab./kota tidak dapat dilaksanakan atau ditunda pelaksanaanya karena adanya PPKM. Penundaaan pelaksanaan kegiatan mengakibatkan realisasi kegiatan melonjak di akhir tahun anggaran.
- b) Perubahan kebijakan anggaran seperti efisiensi mempengaruhi proses perencanaan kegiatan dan penganggaran TA 2021 dan juga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan di tahun berjalan sehingga banyak terjadi penyesuaian perencanaan dan revisi DIPA atau petunjuk operasional kegiatan. Dalam TA 2021 BKTM Makassar telah melakukan revisi DIPA sebanyak 10 kali yang mengakibatkan perencanaan penarikan dana tidak sejalan dengan realisasi anggaran.

Beberapa langka alternatif yang akan ditempuh tahun depan guna meminimalisir terjadinya hambatan dalam pencapaian target yaitu:

a) Setelah melalui dua tahun masa pandemi, dapat dilakukan analisis waktu perkiraan penetapan PPKM oleh pemerintah. Sehingga dapat dilakukan penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan yang lebih tepat. Kegiatan yang harus dilaksanakan secara luring dijadwalkan dilaksanakan sebelum masa ditetapkannya PPKM di masa pandemi. Sedangkan kegiatan



- yang dapat dilaksanakan secara daring dijadwalkan untuk dilaksanakan pada masa PPKM. Dengan demikian tidak akan terjadi penundaan jadwal pelaksanaan kegiatan
- b) Bila revisi anggaran merupakan keharusan maka perlu mempercepat proses revisi anggaran sehingga perencanaan penarikan dana dapat sejalan dengan realisasi anggaran.

### 2. Analisis Akuntabilias Capaian Indikator Kinerja Antara

Selain indikator kinerja utama yang mengikuti indikator kinerja utama eselon 1, BKTM Makassar juga menetapkan Indikator Kinerja Antara di bidang kesehatan tradisional yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dasar penetapan Indikator Kinerja Antara ini yaitu Permenkes nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Kesehatan Tradisional Masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan permenkes tersebut, BKTM Makassar telah menyusun tujuan organisasi. Adapaun tujuan BKTM Makassar yaitu tersedianya menyelenggarakan puskesmas yang pelayanan kesehatan tradisional. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilaksanakan beberapa kegiatan yang merupakan perwujudan dari fungsi BKTM Makassar sekaligus ditetapkan sebagai indikator kinerja antara, yaitu:

1) Penyusunan rencana program dan anggaran

Dalam rangka menjalankan fungsi penyusunan rencana program dan anggaran maka dilaksanakan dua kegiatan yaitu penguatan kelembagaan dan sinkronisasi perencanaan bidang kesehatan tradisional. Penguatan kelembagaan merupakan kegiatan pertemuan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkuat komitmen kab./kota dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional di wilayahnya sehingga dapat tersedia pelayanan kesehatan tradisional di fasyankes sesuai dengan Permenkes 37 amanat nomor tahun 2017 tentang



Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi. Kegiatan ini dilaksanakan di BKTM Makassar dengan sasaran sebanyak 12 kab./kota yaitu:

a) Kab. Wajo

g) Kab. Sinjai

b) Kab. Sidrap

h) Kab. Luwu

c) Kab. Toraja

i) Kab. Luwu Utara

d) Kab. Toraja Utara

j) Kab. Makassar

e) Kab. Bantaeng

k) Kab. Takalar

f) Kota Barru

I) Kab. Pare-Pare

Kegiatan sinkronisasi dilaksanakan untuk menyelaraskan perencanaan kegiatan dan anggaran antara BKTM Makasar dengan dinas kesehatan kab./kota di wilayah jejaring BKTM Makassar sehingga pelaksanaan kegiatan terkait yankestrad dapat lebih efektif dan efisien. Kegiatan sinkronisasi telah dilaksanakan sesuai target yaitu satu kali, dilaksanakan di BKTM Makassar dengan sasaran sebanyak 10 kab./kota yaitu:

a) Kab. Wajo

f) Kab. Bantaeng

b) Kota Palopo

g) Kab. Pangkep

c) Kab. Bone

h) Kab. Bulukumba

d) Kab. Jeneponto

i) Kab. Sinjai

e) Kab. Gowa

j) Kab. Soppeng

2) Fasilitasi pengembangan dan penerapan model yankestrad Dalam rangka menjalankan fungsi fasilitasi pengembangan dan penerapan model yankestrad maka dilaksanakan beberapa kegiatan mulai dari kegiatan pelayanan kesehatan tradisional yang dilaksanakan di dalam gedung BKTM Makassar yang terdiri atas: poli umum, akupunktur, akupresur, ramuan, gizi, SPA. Kegiatan pelayanan ini dilaksanakan dalam rangka pengembangan model dan metode pelayanan kesehatan tradisional yang dapat diaplikasikan di fasyankes kab./kota. Hasil

dari kegiatan tersebut yaitu model dan metode pelayanan



kesehatan tradisisonal yang dapat diintegrasikan ke fasyankes kab./kota.

Sebagai upaya untuk mengintegrasikan model dan metode yang dihasilkan dari kegiatan sebelumnya maka dilaksanakan kegiatan pengembangan model yankestrad di fasyankes kab./kota yang terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan. Dimulai dengan kegiatan penentuan sasaran pengembangan model yankestrad, kegiatan ini dilaksanakan di BKTM Makassar dengan sasaran Kab. Barru dan Kab. Jeneponto. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan penentuan sasaran pengembangan model yankestrad yaitu untuk mendapatkan puskesmas yang tepat dijadikan sebagai sasaran pelaksanaan pengembangan model, yaitu puskesmas yang telah memiliki nakes terlatih yankestrad dan berkomitmen untuk menyelenggarakan yankestrad. Untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional puskesmas modalitas utamanya yaitu nakes terlatih yankestrad. Oleh karena itu penentuan sasaran sangatlah perlu dilakukan sebelum dilaksanakannya kegiatan pengembangan model yankestrad. Dengan demikian diharapkan setelah dilaksanakanya kegiatan pengembangan model yankestrad, puskesmas dapat mengintegrasikan yankestrad ke dalam pelayanan yang ada di puskesmas.

Setelah penentuan saasaran dilanjutkan dengan kegiatan pengembangan model di fasyankes kab./kota itu sendiri yang dilaksanakan di empat puskesmas terpilih yaitu Puskemas Ralla dan Puskesmas Doi-Doi di Kab. Barru serta Puskesmas Moncobalang dan Puskesmas Rumbia di Kab. Jeneponto. Kegiatan pengembangan model yankestrad dilaksanakan oleh tim yang terdiri atas dokter, adminkes, fisioterapi terlatih akupresur, tenaga farmasi terlatih ramuan, dan nutrisionist. Dokter bertugas untuk memberikan paparan tentang teknis



pelaksanaan yankestrad di puskesmas, adminkes bertugas untuk memberikan paparan terkait dukungan kebijakan dan persiapan administrasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional. Tenaga teknis lainya bertugas untuk memberikan contoh model pelayanan kesehatan tradisional yang dapat diintegrasikan ke dalam pelayanan perorangan (UKP) atau program-program kesehatan masyarakat (UKM) yang ada di puskesmas.

Hasil dari kegiatan pengembangan model yankestrad di fasyankes akan didiseminasiinformasikan kepada dinas kesehatan kab./kota. Pada tahun 2021 sasaran kegiatan diseminasi informasi hasil pengembangan model yaitu Kab. Wajo dan Kab. Jeneponto.

Guna memperoleh dukungan regulasi dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional di fasyankes kab./kota maka dilaksanakan kegiatan advokasi yankestrad. Sasaran kegiatan advokasi yankestrad pada tahun 2021 yaitu Kab. Soppeng, Sinjai, dan Sidrap. Selain itu untuk menyebarluaskan hasil pengembangan model yankestrad kepada masyarakat maka dilaksanakan kegiatan GERMAS dan diseminasi informasi yankestrad. Kegiatan GERMAS terlaksana satu kali di Kab. Barru, sementara kegiatan diseminasi informasi yankestrad melalui pojok jamu dan pemberian pangan fungsional terhitung terlaksana satu kegiatan masing-masing.

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan fungsi fasilitasi pengembangan dan penerapan model yankestrad menargetkan output 25 kegiatan, dengan realisasi sesuai target.

### 3) Fasilitasi rujukan penapisan yankestrad

Fungsi fasilitasi rujukan penapisan dilaksanakan dengan tujuan untuk menapis model, bahan, maupun metode pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan model pelayanan kesehatan tradisional. Untuk



tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan penapisan yankestrad yang menghasilkan dokumen penapisan berjudul "Analisis Penggunaan Obat Modern Asli Indonesia (OMAI) Berdasarkan 10 Penyakit Terbanyak".

### 4) Bimbingan teknis yankestrad

Bimbingan teknis pelayanan kesehatan tradisional merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memfasilitasi puskesmas kabupaten kota dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional berbasis asuhan mandiri pemanfaatan tanaman obat keluarga (TOGA) dan pengolahan makanan fungsional. Kegiatan ini dimulai dengan memfasilitasi penanaman TOGA di puskesmas kab./kota. Kegiatan fasilitasi penanaman TOGA semula direncanakan dilaksanakan di 18 puskesmas, realisasinya telah terlaksana di 19 puskemas yaitu:

- a. Puskesmas Doi-Doi Kab. Barru
- b. Puskesmas Ralla kab. Barru
- c. Puskesmas Lisu Kab. Barru
- d. Puskesmas Tanralili Kab. Maros
- e. Puskesmas Turikale Kab. Maros
- f. Puskesmas Tompobulu Kab. Gowa
- g. Puskesmas Samataring kab. Sinjai
- h. Puskesmas Kading Kab. Bone
- Puskesmas Palaka Kab. Bone
- j. Puskesmas Binamu Kab. Jeneponto
- k. Puskesmas Bontoramba Kab. Jeneponto
- I. Puskesmas Rumbia kab. Jeneponto
- m. Puskesmas Wara Utara Kota Palopo
- n. Puskesmas Walenrang Utara Kab. Luwu
- o. Puskesmas Kondora Kab. Toraja
- p. Puskesmas Sinoa Kab. Bantaeng
- q. Puskesmas Tanrutedong Kab. Sidrap



- r. Puskesmas Panincong Kab. Sidrap
- s. Puskesmas Kullo Kab. Pinrang

Setelah dilakukan penanaman TOGA dilanjutkan dengan pemberian bimbingan teknis kepada pengelola program kesehatan tradisional maupun tenaga terlatih kesehatan tradisional dalam memanfaatakan TOGA untuk pembuatan ramuan dan pembuatan makanan fungsional secara mandiri. Dengan demikian pengelola proram kestrad dan nakes terlatih yankestrad dapat melanjutkan edukasi pemanfaatan TOGA kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memanfaatkan TOGA untuk memelihara kesehatan maupun mengatasi masalah kesehatannya secara mandiri.

Selain melalui kegiatan fasilitasi pemanfaatan TOGA pelaksanaan fungsi pemberian bimbingan teknis juga ditunjang oleh kegiatan sosialisasi asuhan mandiri. Terdapat kegiatan sosialisasi asuhan mandiri yang dilaksanakan oleh LP/LS yang melibatkan BKTM Makassar yaitu sosialisasi asuhan mandiri di Kelurahan Paccerakang, Kelurahan Birua, Kelurahan Katimbang, dan di Dinas Kesehatan Kota Makassar.

Dengan demikian dari target 18 kegiatan bimbingan teknis yankestrad realisasinya menjadi 23 kegiatan, dengan capaian 127,8%.

Pelaksanaan kemitraan di bidang kesehatan tradisional Pelaksanaan fungsi kemitraan di bidang kesehatan tradisional dimulai dengan dilaksanakannya kegiatan identifikasi sasaran kemitraan yang dilanjutkan dengan kegiatan pertemuan sasaran kemitraan yang nantinya akan menghasilkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di bidang pengembangan pelayanan kesehatan tradisional dengan LP/LS. Kegiatan indentifikasi sasaran kemitraan dan pertemuan sasaran kemitraan telah terlaksana di Kab. Maros, Gowa, dan Pare-Pare.



### 6) Monitoring evaluasi yankestrad

Monitoring evaluasi pelayanan kesehatan tradisional merupakan kegiatan untuk memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional di puskesmas kab./kota terutama yang menjadi sasaran kegiatan pengembangan model yankestrad dan bimbingan teknis yankestrad. Pada tahun 2021 kegiatan monitoring evaluasi yankestrad telah dilaksanakan di 15 kab./kota sesuai dengan jumlah kab./kota sasaran kegiatan pengembangan model dan bimbingan teknis.

Adapun faktor-faktor pendukung tercapainya target indikator kinerja antara yaitu:

- a. pelayanan kesehatan tradisional sudah menjadi bagian dari struktur organisasi baik di provinsi maupun di kab./kota dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten yang kemudian ditindaklanjuti oleh masing-masing pemerintah provinsi
- b. tersedianya tenaga teknis terlatih yankestrad yang dimiliki oleh BKTM Makassar yang berkompoten untuk melaksanakan bimbingan teknis pelayanan kesehatan tradisional di kab./kota provinsi jejaring.
- terlaksananya kajian di bidang kestrad sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional di wilayah jejaring
- d. penerimaan dan pendampingan yang baik dari dinas kesehatan kab/kota sangat membantu dan memperlancar proses pembinaan pelayanan kesehatan tradisional
- e. adanya dukungan dana dari APBD untuk pengembangan yankestrad di kabupaten kota
- f. tersedianya sarana prasarana di kab./kota untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional



- g. tersedianya tenaga kesehatan terlatih yankestrad di kab./kota
- h. adanya peningkatan minat masyarakat dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan tradisional sebagai salah satu upaya kemandirian masyarakat dalam memelihara kesehatannya

Selain faktor-faktor pendukung keberhasilan terdapat pula hambatan dalam mencapai tujuan akhir dari kegiatan tersebut, diantaranya:

- a. dinas kesehatan kab./kota provinsi jejaring yang telah berkomitmen terkendala implementasi regulasi di daerah dalam bentuk Perda, SK bupati, SK gubernur, dll
- b. belum masuknya layanan kesehatan tradisional dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat (BPJS Kesehatan)
- c. masih kurangnya wawasan pengelola di kabupaten tentang peraturan terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional sehingga belum maksimal dalam melakukan pembinaan ke puskesmas
- d. dihilangkanya kebijakan teknis penggunaan dana BOK di puskesmas untuk kegiatan yankestrad
- e. masih kurangnya koordinasi dan komunikasi baik lintas program maupun lintas sektor dalam penyelenggaraan yankestrad
- f. masih kurangnya pedoman terkait implementasi regulasi upaya yankestradkom
- g. masih kurangnya SOP pelayanan kesehatan tradisional yang aman dan bermanfaat
- h. masih kurangnya NSPK terkait dengan pembinaan teknis pelayanan kesehatan tradisonal

Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan tahun 2022 yaitu:

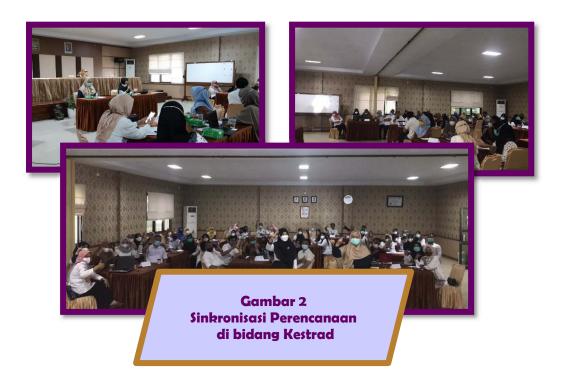
 a. mengoptimalkan koordinasi dengan dinas kesehatan provinsi dan kab./kota jejaring sebagai koordinator di daerah dalam mensosialisasikan penyelenggaraan kesehatan tradisional



- sesuai Permenkes No 37 tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi
- b. mengoptimalkan koordinasi tidak hanya pada lintas sektor kesehatan tetapi lintas sektor non kesehatan yang berperan dalam regulasi dan penganggaran daerah (hukum dan organisasi, Bapeda, dan DPRD)
- c. pelaksanaan kegiatan koordinasi, sosialisasi, dan advokasi yankestrad akan lebih difokuskan di kabupaten/kota jejaring yang berdasarkan hasil monev yankestrad membutuhkan dukungan regulasi/ kebijakan dalam penyelenggaraan yankestrad
- d. membantu kab./kota provinsi jejaring dalam fasilitasi penyelenggaraan kesehatan tradisional untuk masyarakat
- e. mengoptimalkan uji coba SOP di lingkup internal, kemudian apabila telah terbukti aman dan bermanfaat akan diterapkan di fasilitas pelayanan kesehatan tradisional di provinsi jejaring
- optimalisasi kajian kesehatan tradisional agar hasilnya dapat dijadikan bahan rekomendasi penyusunan NSPK oleh pihak yang berwenang.



























Tabel 5
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Target dan
Target Periode Renstra

ı	V .		TAHUN							
19	SASARAN	INDIKATOR	INDIKATOR 2020 2021					2021		2022
	STRATEGIS	KINERJA	TAR GET (%)	REALI SASI (%)	CAPAI AN (%)	TAR GET (%)	REALI SASI (%)	CAPAI AN (%)	TAR GET (%)	
,	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program	Nilai Reformasi Birokrasi pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	56,5	87	153,98	57,5	83,24	144,76	58,5	
	Kesehatan Masyarakat	Persentase kinerja RKAKL pada Program Kesehatan Masyarakat	80	98,25	122,82	82,5	98,13	118,95	85	

Sumber: Data Primer BKTM Makassar

Pada tabel 5 tampak bahwa target indikator kinerja nilai reformasi birokrasi pada program pembinaan kesehatan masyarakat pada tahun 2021 sebesar 57,5% sementara realisasinya sebesar yaitu 83,24%. Dengan demikian realisasi indikator tersebut telah melampaui target dengan capaian sebesar 144,76%. Realiasi indikator nilai reformasi birokrasi tahun 2021 lebih rendah dibandingkan tahun 2020 namun telah melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2022.

Sementara itu realisasi indikator kinerja persentase kinerja RKAKL pada Program Kesehatan Masyarakat pada tahun 2021 ini telah melampaui target yaitu sebesar 98,13%. Walaupun realisasi tahun ini lebih rendah dari tahun sebelumnya namun telah melampau target yang ditetapkan untuk tahun berikutnya. Gambaran perbandingan realisasi antara tahun 2021



dengan tahun sebelumnya dan target tahun berikutnya dapat dilihat pada grafik 1 dan 2 berikut ini.



Grafik 1
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan dengan Target dan Target
Periode Renstra Nilai Reformasi Birokrasi pada
Program Kesehatan Masyarakat

Pada grafik 1 terlihat gambaran target, realisasi, dan capaian nilai indikator reformasi birokrasi pada program kesehatan masyarakat. Target lima tahunan yang telah ditetapkan untuk tahun 2020-2024 berturut-turut yaitu 56,5%, 57,5%, 58,5%, 59,5%, dan 60%. Gambaran realisasi nilai reformasi birokrasi untuk tahun 2020 dan 2021 telah melampau target yang ditetapkan berturut-turut sebesar 87% dan 83,24%. Namun, jika dibandingkan realisasi antara tahun 2020 dan 2021 terlihat bahwa realisasi tahun 2020 lebih rendah dari tahun 2021. Walaupun demikian realisasi tahun 2021 jika dibandingkan dengan target tahun berikutnya terlihat telah berada di atas target yang ditetapkan.

Tercapainya target reformasi birokrasi pada tahun 2021 tentunya tak lepas dari komitmen kepala balai dan upaya seluruh ASN BKTM Makassar



dalam memenuhi kriteria penilaian reformasi birokrasi. Selain itu adanya pendampingan dari eselon 1 dalam persiapan pelaksanaan penilaian reformasi birokrasi juga turut andil dalam pencapaian indikator tersebut.



Grafik 2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan dengan Target dan Target
Periode Renstra Persentase kinerja RKAKL pada
Program Kesehatan Masyarakat

Grafik 2 menggambarkan target, realisasi, dan capaian nilai indikator persentase kinerja RKAKL program kesehatan masyarakat. Terlihat realisasi pada tahun 2021 (98,13%) telah melampauai target yang ditetapkan (82,5%). Kemudian jika dibandingkan antara realisasi tahun 2021 (98,13%) dengan target tahun berikutnya yaitu target tahun 2022 (85%) terlihat telah melampaui target yang ditetapkan.

Realisasi nilai indikator kinerja nilai RKAKL pada program kesehatan masyarakat yang selalu melampaui target didukung oleh adanya beberapa faktor, diantaranya:

 a) Dukungan penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan penganggaran yang dilakukan di lingkup internal ataupun



- asistensi langsung ke Sekertariat Drektorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
- b) Tersedianya beberapa aplikasi terkait perencanaan dan pelaporan yang dapat memonitoring realisasi kegiatan perbulan secara online oleh eselon I sehingga memacu kinerja BKTM Makassar
- c) Dilaksanakannya kegiatan penguatan kelembagaan serta sinkronisasi perencanaan di bidang kesehatan tradisional dengan mengundang kab./kota guna membahas permasalahan-permasalah terkait dengan rencana kegiatan pengembangan kelembagaan pelayanan kesehatan tradisional di fasyankes.
- d) Peningkatan kualitas SDM melalui kegiatan layanan SDM yaitu kegiatan penguatan service peningkatan kapasitas manajemen, pengembangan penunjang layanan kestrad, dan peningkatan kapasitas SDM penyusun LAKIP. Melalui peningkatan kualitas SDM diharapkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik yang pada akhirnya dapat menunjang kinerja organisasi.

Selain indikator kinerja utama, BKTM Makassar juga memiliki indicator kinerja antara di bidang kesehatan tradisional yang merupakan pelaksanaan fungsi BKTM Makassar. Dasar pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Kesehatan Tradisional Masyarakat. Dengan demikian, tugas pokok dan fungsi organisasi tetap dapat terlaksana. Gambaran perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja antara BKTM Makassar ditampilkan pada tabel dan grafik berikut ini:



Tabel 6
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja AntaraTahun Berjalan dengan Target dan Target Periode Renstra

			AHUN 202		<b>TAHUN 2021</b>			
N 0	INDIKATOR KINERJA ANTARA	TARG ET	REALI SASI	CAPA IAN	TAR GET	REALI SASI	CAPA IAN	
1	Penyusunan rencana, program, dan anggaran	1 kegiat an	1 kegiat an	100%	2 kegi atan	2 kegiat an	100%	
2	Fasilitasi pengembangan dan penerapan model yankestrad	14 kegiat an	14 kegiat an	100%	17 kegi atan	17 kegiat an	100%	
3	Fasilitasi rujukan penapisan yankestrad	1 kegiat an	0 kegiat an	0%	1 kegi atan	1 kegiat an	100%	
4	Bimbingan teknis yankestrad	13 kegiat an	22 kegiat an	169,2 3%	18 kegi atan	23 kegiat an	127,8 %	
5	Pelaksanaan kemitraan di bidang kesehatan tradisional	4 kegiat an	4 kegiat an	100%	6 kegi atan	6 kegiat an	100%	
6	Monitoring evaluasi yankestrad	26 kegiat an	24 kegiat an	92,37 %	15 kegi atan	15 kegiat an	100%	

Sumber: Data Primer BKTM Makassar

Pada tabel 6 dirincikan bahwa untuk capaian indikator kinerja pertama di tahun 2020 dan 2021 sama yaitu 100%, yang membedakan yaitu volume kegiatan dimana terdapat penambahan satu jenis kegiatan di tahun 2021 yaitu kegiatan sinkronisasi perencanaan di bidang kesehatan tradisional. Kegiatan sinkronisasi merupakan tindak lanjut



dari hasil evaluasi kegiatan tahun 2020 guna mengefisiensikan pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan tradisional yang diselenggarakan oleh BKTM Makassar dan Kab./kota itu sendiri.

Sama halnya dengan capaian indikator kinerja antara ke-2, capaian di tahun 2020 dan 2021 sama yaitu 100%, yang membedakan yaitu terdapat penambahan tiga jenis kegiatan baru di tahun 2021 yaitu diseminasi informasi hasil pengembangan model yankestrad, advokasi yankestrad, dan germas. Ketiga kegiatan tersebut pun merupakan hasil tindak lanjut dari evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

Indikator kinerja antara ke-3 pada tahun 2020 tidak terlaksana sebab tidak adanya rujukan penapisan dari SP3T jejaring. Pada tahun 2021 telah dilaksanakan satu kegiatan penapisan di bidang kesehatan tradisional yang menghasilkan kajian berjudul "Analisis Penggunaan Obat Modern Asli Indonesia (OMAI) Berdasarkan 10 Penyakit Terbanyak".

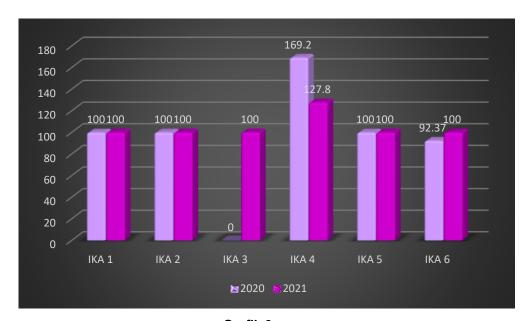
Indikator kinerja antara ke-4 pada tahun 2020 dan 2021 telah terlaksana melampaui target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 169,23% pada tahun 2020 dan 127,8% pada tahun 2021. Tingginya capaian indikator di tahun 2020 disebabkan adanya penambahan volume kegiatan akibat perubahan metode kegiatan. Kegiatan asuhan mandiri yang semula direncanakan dilaksanakan di 3 kab./kota namun karena adanya pandemi covid-19 maka metode pelaksanaan kegiatan diubah menjadi secara daring sebanyak 10 kali.

Capaian indikator kinerja antara ke-5 pada tahun 2020 dan 2021 sama yaitu 100% namun volume kegiatan di tahun 2021 lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 kegiatan kemitraan dilaksanakan di Kab. Takalar dan Enrekang, sementara di tahun 2021 terlaksana di Kab. Maros, Gowa, dan Kota Pare-Pare.

Capaian indikator kinerja ke-6 pada tahun 2020 tidak mencapai target yang ditetapkan disebabkan tidak dilaksanakanya monitoring evaluasi ke provinsi sasaran akibat adanya kebijakan PPKM. Sebagai



tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan kegiatan di tahun sebelumnya maka pada tahun 2021 kegiatan monitoring evaluasi ke provinsi jejaring tidak direncanakan. Adapun gambaran perbandingan capaian indicator kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Antara
Tahun 2020 dan tahun 2021

Pada grafik 3 tampak bahwa realisasi indikator antara pada tahun 2020 dan 2021 rata-rata telah terlaksana sesuai target bahkan terdapat satu indikator yang melampaui target yaitu pelaksanaan bimbingan teknis yankestrad. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan sosilaisasi asuhan mandiri yankestrad yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan kab./kota dengan melibatkan BKTM Makassar dan menunjang pencapaian kinerja BKTM Makassar. Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten yang



kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi masing-masing, kesehatan tradisional sudah menjadi bagian dari struktur organisasi baik di provinsi maupun di kab./kota. Dengan demikian program pelayanan kesehatan tradisional menjadi suatu program wajib di setiap dinas kesehatan kab/kota.

Selain itu tersedianya tenaga kesehatan terlatih yankestrad di kab/kota serta tersedianya tenaga teknis terlatih yankestrad yang dimiliki oleh BKTM Makassar yang berkompoten untuk melaksanakan bimbingan teknis yankestrad di kab./kota provinsi jejaring juga turut mendukung.

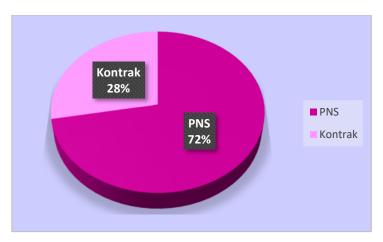
Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis yankestrad ke kab/kota dibutuhkan bahan/ materi pembinaan. Oleh karena itu sejak tahun 2012 BKTM Makassar telah melaksanakan kajian terkait kesehatan tradisional dan sejak tahun 2017 dilaksanakan implementasi hasil pengembangan model yankestrad. Hasil dari kedua kegiatan tersebut digunakan sebagai bahan bimbingan teknis dan pengembangan yankestrad di kab/kota wilayah jejaring.

### 2. Analisis Sumber Daya dan Sarana

### a) Sumber Daya Manusia

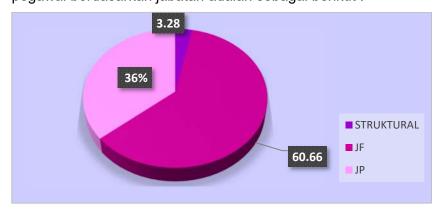
Tenaga yang ada di BKTM Makassar Tahun 2021 berjumlah 61 orang yang terdiri dari 44 orang tenaga PNS dan 17 orang tenaga kontrak sebagaimana tergambar dalam di grafik 4 berikut :





Sumber: data primer kepegawaian tahun 2021
Grafik 4
Status Kepegawaian BKTM Makassar
Tahun 2021

Berdasarkan data pada grafik 4 terlihat bahwa 28% dari jumlah pegawai adalah pegawai kontrak/ non PNS. Hal ini disebabkan karena besarnya beban kerja dari masing-masing jabatan sehingga untuk menjalankan fungsinya masih dibutuhkan tenaga non PNS dengan jabatan yang disesuaikan berdasarkan peta jabatan dan latar belakang pendidikan. Adapun distrubusi pegawai berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut:



Sumber: data primer kepegawaian tahun 2021
Grafik 5
Distribusi Tenaga Berdasarkan Jabatan/Kompetensi
di BKTM Makassar
Tahun 2020



Pada grafik 5 digambarkan distribusi pegawai berdasarkan jabatan yaitu dua orang (3,28%) pejabat struktural terdiri dari Kepala Balai dan Kasubag Tata Usaha, JP serta JF masing-masing 22 orang (36,07%) dan 37 orang (60,66%)

Jenjang jabatan yang ada di BKTM Makassar adalah terdiri dari 37 jenis jenjang jabatan sebagai berikut :

Tabel 7
Distribusi Tenaga Berdasarkan Jabatan/Kompetensi di BKTM Makassar
Tahun 2020

		STATUS KEPEGAWAIAN				
NO	JABATAN/KOMPETENSI	PNS NON TO				
	JABATAN STRUKI	URAL				
1	Kepala Balai	1	0	1		
2	Kasubag Adum	1	0	1		
	SUBTOTAL	2	0	2		
	JABATAN PELAK	SANA				
1	Administrasi Kesehatan	1	0	1		
2	Analis Keuangan	1	0	1		
3	Arsiparis Ahli	0	1	1		
4	Pengadministrasi Keuangan	0	2	2		
5	Pengadministrasi Umum	0	1	1		
6	Fisioterapis	0	2	2		
7	Perawat	0	1	1		
8	Asisten Apoteker	1	1	2		
9	Pranata Laboratorium Ahli	1	1	2		
10	Dokter	1	0	1		
11	Petugas Keamanan	0	4	4		
12	Peramu Kebun	0	3	3		
13	Binatu	0	1	1		
	SUBTOTAL	5	17	22		



	JABATAN FUNGSI	ONAL		
1	Dokter Madya	3	0	3
2	Dokter Muda	2	0	2
3	Apoteker Madya	1	0	1
4	Asisten Apoteker Mahir	1	0	1
5	Asisten Apoteker Terampil	2	0	2
6	Adminkes Muda	1	0	1
7	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	4	0	4
8	Nutrisionis Muda	2	0	2
9	Nutrisionis Terampil	2	0	2
10	Fisioterapis Pertama	3	0	3
11	Perawat Pertama	1	0	1
12	Perawat Penyelia	1	0	1
13	Perawat Terampil	3	0	3
14	Fisioterapis Penyelia	1	0	1
15	Fisioterapis Mahir	3	0	3
16	Fisioterapis Terampil	1	0	1
17	Analis Kepegawaian Ahli Muda	1	0	1
18	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1	0	1
19	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1	0	1
20	Perencana Ahli Pertama	1	0	1
21	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	0	1
22	Pranata Keuangan APBN Mahir	1	0	1
_	SUBTOTAL	37	0	37
_	TOTAL	44	17	61

Sumber: Data sekunder kepegawaian 2021

### b) Sarana dan Prasarana

Nilai BMN pada BKTM Makassar Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 33.327.384.811 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sebelas rupiah), nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan neraca yaitu persediaan, tanah, peralatan dan mesin,



gedung dan bangunan dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset lainnya. Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8
Nilai BMN dalam Pos Perkiraan Neraca
BKTM Makassar Tahun 2021

NO	URAIAN NERACA		INTRA KOMPATIBEL	EKSTRA KOMPATIBEL	GABUNGAN		
			Rp	Rp		Rp	%
-1	ASET LANCAR	Rp	71.985.246,00		Rp	71.985.246,00	0,22
	Persediaan	Rp	71.985.246,00		Rp	71.985.246,00	0,22
Ш	ASET TETAP	Rp	32.604.703.194,00	Rp 17.214.669,00	Rp	32.621.917.863,00	97,88
	Tanah	Rp	12.692.867.000,00		Rp	12.692.867.000,00	38,09
	Peralatan & Mesin	Rp	6.006.374.194,00	Rp 17.214.669,00	Rp	6.023.588.863,00	18,07
	Gedung	Rp	13.782.256.000,00		Rp	13.782.256.000,00	41,35
	Jaringan	Rp	123.206.000,00		Rp	123.206.000,00	0,38
Ш	ASET LAINNYA	Rp	633.481.702,00		Rp	633.481.702,00	1,90
	Software	Rp	130.533.142,00		Rp	130.533.142,00	0,39
	Aset Diberhentikan	Rp	502.948.560,00		Rp	502.948.560,00	1,51
	TOTAL	Rp	33.310.170.142,00	Rp 17.214.669,00	Rp	33.327.384.811,00	100,00

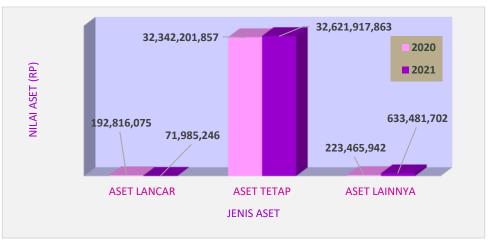
Sumber: Data sekunder BMN 2021

Dari tabel tampak bahwa Nilai Aset per Desember tahun 2021 adalah sebesar Rp.33.327.384.811,- (tiga puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sebelas rupiah). Dari tabel di atas juga terlihat bahwa terdapat aset peralatan dan mesin dengan kategori ekstra kompotabel sebesar Rp.17.214.669,- (0,05%) sehingga nilai aset yang tercacat dalam neraca adalah sebesar Rp. 33.310.170.142,- (tiga puluh tiga miliar tiga ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu seratus empat puluh dua rupiah (99,95%). Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan dalam penganggaran dimana terdapat sejumlah barang belanja modal dengan nilai di bawah satu juta yang seharusnya masuk dalam perencanaan jenis belanja operasional.

Dibandingkan dengan Tahun 2020 jumlah total nilai aset sebesar Rp.32.758.483.874,- (tiga puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah). Terdapat Pertambahan total nilai aset pada tahun



2021 sebesar Rp. 568.900.937,- (lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau 1,74% dari nilai aset tahun 2020. Namun berdasarkan jenisnya, pada aset lancar terjadi penurunan nilai sebesar 62,67%, pada aset tetap meningkat sebesar 0,86% dan pada aset lainnya juga meningkat secara signifikan sebesar 183,48% yang digambarkan pada gambar berikut:



Sumber: Data sekunder BMN 2021

Grafik 6 Visualisasi Nilai Aset Berdasarkan Jenis Aset Tahun 2020 dan 2021

#### C. REALISASI ANGGARAN

Sumber daya anggaran adalah unsur utama selain SDM dalam menunjang pencapaian indikator kinerja. Peranan pembiayaan sangat berpengaruh terhadap penentuan arah kebijakan dan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan upaya pembangunan di bidang kesehatan tradisional.

Dalam rangka pelaksanaan program kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Eselon I, berdasarkan DIPA BKTM Makassar Nomor SP DIPA-024.03.2.415382/2021, BKTM Makassar mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.028.527.000,- (sepuluh miliyar dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Anggaran tersebut



merupakan pagu akhir setelah beberapa kali dilakukan perubahan akibat adanya refocussing.

Adapun rincian realisasi anggaran per kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9
Alokasi dan Realiasai Belanja BKTM Makassar Berdasarkan
Komponen Kegiatan Tahun 2021

	NOMENKELA	V		ALOKASI		<u> </u>	CAPAIAN		
N	TUR	0	SATU	ANGGARAN	FI		ANGGARAN		
0	KOMPONEN	L	AN		SIK	%	Realisasi	%	
				40 000 507 000			0.000 505 407	98,30	
				10.028.527.000			9.862.565.197	%	
	Layanan Kesehatan Tradisonal Masyarakat								
1	Pelayanan								
	Kesehatan	16	Kegiat	1.201.487.000	16	100	1.130.268.825	94,07	
	Tradisional		an			%		%	
	Masyarakat								
2	Orientasi Teknis								
	Kesehatan	1	Kegiat	65.880.000	1	100	60.562.427	91,93	
	Tradisional		an			%		%	
		<u> </u>	L	ayanan Perkantor	an				
3	Gaji dan	1	Layan		1	100		99,23	
	Tunjangan		an	5.617.096.000		%	5.574.114.723	%	
4	Operasional dan								
	Pemeliharaan	5	Layan	2.501.902.000	5	100	2.452.618.384	99,22	
	Kantor		an			%		%	
		L	ayanan U	mum dan Layanan	Penga	daan			
5	Pelayanan								
	Umum dan	1	Kegiat	485.680.000	1	100	485.664.566	100%	
	pengadaan		an			%			
				Layanan SDM					
6	Pelayananan	9	Kegiat	156.482.000	9	100	155.266.000	99%	
	Kepegawaian		an			%			

Sumber: Data Keuangan Tahun 2021

Pada tabel 12 dirincikan terdapat empat komponen kegiatan yang terdiri atas subkomponen kegiatan yang secara keseluruhan terealiasi



100 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.862.565.197 (98,30%). Dengan demikian terdapat efesiensi anggaran sebesar Rp.170.032.075,- (seratus tujuh puluh juta tiga puluh dua ribu tujuh puluh lima rupiah) atau 1,70%.

Efisiensi anggaran diantaranya diperoleh melalui kegiatan bimbingan teknis yankestrad. Sebagai contoh, pada kegiatan fasilitasi pemanfaatan TOGA yang pada awalnya direncanakan dilaksanakan di 18 puskesmas pada akhirnya dapat terlaksana di 19 puskesmas. Berdasarkan perhitungan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemanfaatan TOGA di 19 puskesmas dibutuhkan dana sebesar Rp. 260.300.000,-, sementara anggaran yang digunakan untuk sebesar Rp. 246.600.000,- Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 13.700.000,- dari hasil perhitungan kebutuhan anggaran kegiatan fasilitasi pemanfaatan TOGA.



# BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

- Perjanjian kinerja Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat (BKTM)
   Makassar telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang terdiri dari Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.
- Indikator Kinerja Utama (IKU) BKTM Makassar yaitu 1) Nilai reformasi birokrasi pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat dengan target sebesar 57,5%, 2) Presentasi kinerja RKAKL pada program Pembinaan Kesehatan Masyarakat dengan target sebesar 82,5%.
- 3. Indikator Kinerja Antara di bidang kesehatan tradisional yaitu:
  - a) Penyusunan rencana kerja program dan anggaran dengan target 2 kegiatan
  - b) Fasilitasi pengembangan dan penerapan model yankestrad dengan target 17 kegiatan
  - c) Fasilitasi rujukan penapisan dengan target 1 kegiatan
  - d) Bimbingan teknis yankestrad dengan target 18 kegiatan
  - e) Pelaksanaan kemitraan di bidang kesehatan tradisional dengan target 6 kegiatan
  - f) Monitoring evaluasi yankestrad dengan target 15 kegiatan
- Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) BKTM Makassar yaitu: 1)
   Nilai reformasi birokrasi pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat sebesar 83,24%, 2) Presentasi kinerja RKAKL pada program Pembinaan Kesehatan Masyarakat sebesar 98,13%
- 5. Realisasi Indikator Kinerja Antara di bidang kesehatan tradisional:
  - a) Penyusunan rencana kerja program dan anggaran dengan realisasi 2 kegiatan
  - b) Fasilitasi pengembangan dan penerapan model yankestrad dengan realisasi 17 kegiatan



- c) Fasilitasi rujukan penapisan dengan realisasi 1 kegiatan
- d) Bimbingan teknis yankestrad dengan realisasi 23 kegiatan
- e) Pelaksanaan kemitraan di bidang kesehatan tradisional dengan realisasi 6 kegiatan
- f) Monitoring evaluasi yankestrad dengan target 15 kegiatan
- Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKTM Makassar yaitu: 1)
   Nilai reformasi birokrasi pada Program Pembinaan Kesehatan
   Masyarakat sebesar 144,76%, 2) Presentasi kinerja RKAKL pada
   program Pembinaan Kesehatan Masyarakat sebesar 118,95%.
- 7. Dalam menunjang pencapaian indikator, BKTM Makassar didukung dengan adanya anggaran sebesar Rp. 10.028.527.000,-. Pada akhir tahun anggaran yang digunakan sebanyak Rp. 9.862.565.197 (98,30%) dengan capaian kinerja kegiatan rata-rata seratus persen. Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.170.032.075,- atau 1,70%
- 8. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat (BKTM) Makassar dapat merealisasikan kegiatannya sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

### **B. SARAN**

Dalam pencapaian indikator di tahun mendatang perlu peningkatan:

- kualitas dan optimalisasi kinerja SDM salah satunya melalui brenchmarking untuk mengukur dan membandingkan kinerja organisasi sehingga dapat meningkatkan keunggulan kompetitif dengan memperbaiki kinerja, meningkatkan produktivitas, memperbaiki mutu pelayanan.
- 2) serta peningkatan sarana dan fasilitas pengembangan model yankestrad.



Harapan kami laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi kinerja bagi unit-unit di lingkup Direktorat Kesehatan Masyarakat, dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan di masa mendatang terutama di bidang kesehatan tradisional.

Sebagai satuan kerja yang memiliki tujuan dalam mengemban tugas pembangunan di bidang kesehatan, tentunya diharapkan bahwa laporan ini dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan arah pencapaian tujuan secara umum di Kementerian Kesehatan dan khususnya di lingkup Direktorat Kesehatan Masyarakat yaitu tercapainya target SDGs.

Keberhasilan yang telah dicapai di tahun 2021 diharapkan dapat memacu agar kegiatan-kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Segala kekurangan dan hal-hal yang menghambat tercapainya target dan rencana kegiatan diharapkan dapat ditemukan solusi dan diharapkan lebih mengutamakan kepentingan publik.

# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BALAI KESEHATAN TRADISIONAL MASYARAKAT (BKTM) MAKASSAR



### PERJANJIAN KINERJA 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Dr.dr. Anna Khuzaimah, M.Kes

Jabatan

: Kepala BKTM Makassar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: dr. Kirana Pritasari, MQIH

Jabatan

: Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini sebagai pertimbangan penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pihak pertama dan kedua akan membahas ulang perjanjian ini bila terjadi perubahan kebijakan anggaran.

Jakarta, 1 Desember 2020

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

dr Kirana Pritasari, MQIH NIP 196404081990032001 Dr.dr. Anna Khuzaimah, M.Kes

### PERJANJIAN KINERJA

Unit Pelaksana Teknis

: Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat (BKTM)

Makassar

Tahun

: 2021

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Lingkup Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat     Persentase kinerja RKAKL lingkup Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	57,5 82,5%	

# Kegiatan

 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

## Anggaran

Rp. 11.278.328.000,-

Jakarta, 1 Desember 2020

Pihak Pertama,

Pihak Kedua

dr. Kirana Pritasari, MQIH NIP 196404081990032001 Dr. dr. Anna Khuzaimah, M.Kes MID 197104062002122001



https://bktm-makassar.org





